

## BAB I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pariwisata berkelanjutan merupakan salah satu konsep yang dipertimbangkan oleh seluruh negara di dunia untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDG's). Salah satu indikator pada tujuan SDG's ke 12 menyebutkan bahwa perlu kolaborasi berbagai pihak untuk menciptakan pariwisata ramah lingkungan (*green tourism*) (BPS, 2016). Akan tetapi, tekanan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan wisata pada saat ini semakin meningkat disebabkan oleh meningkatnya jumlah pengunjung dan bertambahnya pembangunan infrastruktur terkait pariwisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang berkunjung ke objek wisata. Hal ini menyebabkan bertambahnya jumlah sampah dan limbah, polusi, masalah sanitasi dan estetika (Sahu, Nair dan Sharma, 2014; Iffa dkk, 2015).

Penelitian Russo (2002) mendapatkan bahwa pariwisata di Venesia tidak diimbangi dengan kebijakan pariwisata yang memperhatikan daya dukung lingkungan, sehingga sub sistem pendukungnya seperti transportasi dan pengelolaan sampah menjadi tidak memadai sesuai dengan peningkatan jumlah wisatawan. Seiring dengan itu penelitian Cole (2012) mengatakan bahwa perkembangan pariwisata di pulau Bali menyebabkan "perebutan" air antara industri pariwisata dan masyarakat lokal terutama untuk pertanian. Penelitian lain yang dilakukan Sharma (2016) di destinasi wisata Kerwa, Bhopal, India menemukan kegiatan pariwisata yang semakin meningkat menyebabkan eksploitasi sumber daya dan menghasilkan limbah yang berbahaya bagi lingkungan termasuk terganggunya kegiatan pariwisata tersebut sehingga mengurangi minat wisatawan untuk berkunjung.

Kebijakan pariwisata di Indonesia diatur oleh Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Wisata Berkelanjutan. Dalam peraturan ini dipertimbangkan kriteria lingkungan untuk melaksanakan kegiatan pariwisata (Kemenpar, 2016). Selain itu pembangunan pariwisata menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan disebutkan

bahwa penyelenggaraan pariwisata salah satunya dilaksanakan dengan prinsip memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup (Kemenpar, 2009). Kementerian Pariwisata telah memiliki *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan 11 Kabupaten/Kota dan Universitas untuk melaksanakan pengembangan pariwisata berkelanjutan. Namun, kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh *Travel and Tourism Competitiveness Index* (TTCI) mengenai kinerja pariwisata negara-negara di dunia dalam mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan sumberdaya alami, menyebutkan bahwa Indonesia berada di posisi 131 di antara 136 negara yang dievaluasi (WEF, 2017). Hal ini disebabkan karena masih banyaknya kegiatan eksploitasi ekosistem yang berlebihan pada destinasi wisata. Selain itu konsumsi air, energi dan sampah yang berasal dari wisatawan sebesar dua kali lipat dibandingkan dengan penduduk pada umumnya, serta masih banyaknya hotel dan restoran yang menggunakan bahan kimia dan bahan yang tidak bisa diuraikan sehingga mempunyai dampak terhadap pencemaran lingkungan (ILO, 2012).

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat tahun 2014-2025, disebutkan bahwa pembangunan pariwisata berorientasi kepada pelestarian lingkungan dan mewujudkan ekonomi hijau (ramah lingkungan) dalam setiap mata rantai usaha pariwisata. Selain itu perlu dilakukan penyusunan regulasi untuk menjaga daya dukung lingkungan (Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, 2014).

Menurut visi Kota Bukittinggi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi tahun 2016-2021, pariwisata merupakan tujuan utama pembangunan diikuti dengan pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa. Dalam misi ke tiga, disebutkan bahwa pembangunan tersebut dilaksanakan secara terpadu dan berwawasan lingkungan. Selain itu dalam misi ke lima, disebutkan bahwa kegiatan pariwisata harus ditingkatkan kualitasnya. Untuk mencapai misi ini ditetapkan sasaran dan arah kebijakan, tetapi belum ditemukan sinergi antara kegiatan pariwisata dan pengelolaan lingkungan hidup.

Menurut penelitian Sanesta (2015), strategi pengembangan pariwisata di Kota Bukittinggi masih terfokus pada teknologi, inovasi dan operasi serta belum memikirkan lebih lanjut tentang keberlanjutan lingkungan yang dapat berkurang karena aktifitas pariwisata. Perhatian menyeluruh mengenai keberlanjutan lingkungan belum dilakukan oleh sektor pariwisata Kota Bukittinggi.

Sebagai ikon pariwisata Sumatera Barat, Bukittinggi memiliki objek wisata unggulan yang hampir semuanya terletak di dalam kota sehingga memudahkan wisatawan berwisata ke berbagai lokasi (Disbudpar Sumbar, 2015). Keunggulan wisata di kota Bukittinggi dibuktikan dengan terjadinya peningkatan tingkat penghunian kamar di Kota Bukittinggi yaitu sebesar 60,86% pada bulan April 2017 (BPS Sumbar, 2017). Akan tetapi, masa depan Bukittinggi saat ini dibayangi oleh kekhawatiran kemampuan daya dukung (*carrying capacity*) kota untuk mengakomodasi beberapa fungsi sekaligus di dalam suatu area terbatas (25,239 km<sup>2</sup>) (Disbudpar Sumbar, 2015).

Menurut penelitian yang dilakukan Saputra (2016), Kota Bukittinggi akan mencapai ukuran optimalnya pada saat jumlah penduduk sebesar 124.614. Namun pada tahun 2016, total jumlah penduduk Kota Bukittinggi telah mencapai 124.715 jiwa (BPS Bukittinggi, 2017). Kondisi ini telah melebihi daya tampung optimal dan dapat menjadi permasalahan yang lebih lanjut pada beberapa tahun mendatang jika permasalahan daya dukung lingkungan tidak cepat diatasi, terutama saat musim wisata dimana jumlah wisatawan akan meningkat.

Kegiatan pariwisata di Kota Bukittinggi menyumbang masalah lingkungan terbesar di Sumatera Barat terutama untuk limbah padat dan limbah cair. Dari keseluruhan objek wisata yang ada di Sumatera Barat, Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan menyumbang limbah padat terbanyak yaitu 3.014 m<sup>3</sup>/hari diikuti dengan Benteng Fort De Kock sebanyak 792 m<sup>3</sup>/ hari. Volume limbah padat yang dihasilkan dari sektor perhotelan yaitu sebesar 70,57 m<sup>3</sup>/hari. Hal ini meningkatkan volume sampah Kota Bukittinggi yang masuk ke TPA Regional Payakumbuh pada tahun 2015 dan merupakan sampah terbanyak yaitu sebesar 34.436 m<sup>3</sup>/hari (Bapedalda Sumbar, 2016). Limbah cair yang dihasilkan dari kunjungan wisata untuk parameter BOD yaitu 248,5 ton/tahun dan untuk parameter COD yaitu 778 ton/tahun (Bapedalda Sumbar, 2015).

Beberapa masalah sosial juga meningkat seiring dengan meningkatnya industri wisata di Kota Bukittinggi. Dari tahun 2011 terjadi peningkatan angka kriminalitas yang dilaporkan yaitu sebanyak 573 kasus dan meningkat menjadi 947 kasus pada tahun 2016 (BPS Bukittinggi, 2017). Hal tersebut akan menurunkan status keberlanjutan lingkungan Kota Bukittinggi karena belum adanya solusi untuk mengatasi masalah yang disebabkan oleh meningkatnya kegiatan pariwisata dan kualitas lingkungan yang semakin menurun akibat daya dukung lingkungan yang tidak memadai.

Kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kota Bukittinggi, belum sepenuhnya mengakomodir pelestarian lingkungan terutama dari sektor pariwisata yang memiliki banyak dampak bagi lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk mengevaluasi sejauh mana arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD sehingga dirumuskan pola pengembangan kegiatan pariwisata berwawasan lingkungan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan industri pariwisata di Kota Bukittinggi?
2. Bagaimana pengaruh kebijakan sektor pariwisata di Kota Bukittinggi terhadap lingkungan?
3. Bagaimana rekomendasi pola pengembangan wisata di masa depan yang lebih ramah lingkungan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis masalah lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan pariwisata.
2. Untuk mengevaluasi kebijakan pariwisata Kota Bukittinggi yang dapat mempengaruhi lingkungan.
3. Untuk merumuskan pola-pola pengembangan wisata di masa depan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Akademis

Memberikan kontribusi terhadap Program Studi Ilmu Lingkungan Universitas Andalas untuk memberikan informasi mengenai kepariwisataan yang diteliti dari aspek lingkungan, sosial dan ekonomi agar kegiatan wisata lebih berwawasan lingkungan.

2. Manfaat Teoritis

Memberikan pemahaman mengenai dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan dari kegiatan pariwisata dan memberikan pengetahuan mengenai kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan pariwisata yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan.

3. Manfaat Praktis

Memberikan masukan kepada pemerintah Kota Bukittinggi mengenai kebijakan yang komprehensif untuk mengatasi masalah lingkungan akibat kegiatan pariwisata sehingga dapat meningkatkan kesadaran pelaku dan pengguna industri pariwisata di Kota Bukittinggi mengenai masalah lingkungan.

#### **E. Batasan Penelitian**

Penelitian ini mengkaji aspek lingkungan dari dampak pembangunan pariwisata yang dilaksanakan di Kota Bukittinggi. Evaluasi kebijakan yang dilakukan adalah evaluasi formatif dan sumatif pada RPJMD Kota Bukittinggi tahun 2016-2025 yang terkait dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dari sektor wisata dan lingkungan.